



Perbandingan Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam di Pakistan dan Inggris: Perspektif Peran Regulasi dan Inovasi Produk

Silvia Dea Lova¹, Naufal Luthfi Alifa²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email: ¹sdea3017@email.com, ²alifanaufaal@email.com

Informasi Artikel

Submitted : 10-09-2025

Accepted : 25-10-2025

Published : 20-11-2025

Keywords:

Islamic Economic

Institutions

Pakistan

United Kingdom

Sustainable Development

Abstract

This study aims to comparatively analyze the dynamics of Islamic economic institutions in Pakistan and the United Kingdom, focusing on evaluating major challenges and formulating adaptive and innovative institutional strengthening strategies to promote stability and inclusion in Islamic finance, while providing applicative reflections for sustainable economic development in Indonesia. The research employs a qualitative approach with comparative and descriptive study design, involving data collection through literature review and thematic content analysis to ensure validity through triangulation. Key findings reveal that in Pakistan, Islamic economic institutions develop through low-risk Sharia mutual funds and Islamic banking with strong liquidity but face challenges of low profitability due to non-performing loans and limited instruments; whereas in the UK, regulatory support and product innovations like sukuk drive growth, despite challenges in public literacy and infrastructure. The interpretation of results emphasizes integrating regulatory strengthening, product innovation, and literacy enhancement as primary strategies, concluding that this comparative model can serve as a foundation for developing Islamic economics in Indonesia that supports sustainable, inclusive, and socially-environmentally oriented MSMEs.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Pakistan dan Inggris secara komparatif, dengan fokus pada evaluasi tantangan utama serta perumusan strategi penguatan kelembagaan yang adaptif dan inovatif untuk mendorong stabilitas dan inklusi keuangan syariah, serta memberikan refleksi aplikatif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif dan deskriptif, melibatkan pengumpulan data melalui studi Pustaka dan analisis isi tematik untuk memastikan validitas melalui triangulasi. Temuan utama menunjukkan bahwa di Pakistan, kelembagaan ekonomi Islam berkembang melalui reksa dana syariah dengan risiko rendah dan perbankan Islam yang kuat dalam likuiditas namun dihadapkan tantangan profitabilitas rendah akibat non-performing loans dan keterbatasan instrumen; sedangkan di Inggris, dukungan regulasi dan inovasi produk seperti sukuk mendorong pertumbuhan, meskipun tantangan literasi masyarakat dan infrastruktur masih signifikan. Interpretasi hasil menekankan integrasi penguatan regulasi, inovasi produk, dan peningkatan literasi sebagai strategi utama, dengan kesimpulan bahwa model komparatif ini dapat menjadi pondasi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang mendukung UMKM berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi sosial-lingkungan.

Kata Kunci: Kelembagaan Ekonomi Islam, Pakistan, Inggris, Pembangunan Berkelanjutan, UMKM.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kelembagaan ekonomi Islam telah menjadi perhatian global seiring dengan pertumbuhan signifikan sektor keuangan syariah yang menawarkan alternatif inklusif dan berkelanjutan dibandingkan sistem keuangan konvensional. Menurut data dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB), aset keuangan Islam global mencapai sekitar USD 4,8 triliun pada tahun 2022, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 10-15% dalam dekade terakhir, hal tersebut didorong oleh permintaan akan instrumen yang sesuai prinsip syariah seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan tanpa riba. Namun demikian, dinamika kelembagaan ekonomi Islam menghadirkan sejumlah tantangan

yang memerlukan solusi strategis, terutama terkait penguatan regulasi, tata kelola syariah, dan inovasi produk keuangan yang sesuai prinsip syariah (Islamic Financial Services Board, 2023).

Di Pakistan, meskipun kematangan sektor keuangan Islam tercermin dari peningkatan likuiditas, permodalan kuat, dan produk seperti reksa dana syariah yang relatif baru namun berkembang pesat, permasalahan profitabilitas akibat *non-performing loans* serta keterbatasan instrumen keuangan Islam menjadi hambatan utama. Berdasarkan laporan *State Bank of Pakistan* (SBP) pada 2023, aset keuangan Islam di Pakistan mencapai PKR 5,2 triliun atau sekitar USD 18,7 miliar, dengan pangsa pasar sekitar 20% dari total aset perbankan. Namun, rasio *non-performing loans* (NPL) untuk bank Islam mencapai 8,5% pada akhir 2022, lebih tinggi dari rata-rata nasional 7,2%, yang menekan profitabilitas dengan *return on assets* (ROA) rata-rata 1,2% jika dibandingkan dengan bank konvensional di angka 1,8%. Disamping itu, keterbatasan instrumen seperti sukuk korporasi, yang hanya mencapai PKR 1,2 triliun pada 2023, membatasi diversifikasi risiko dan likuiditas, meskipun SBP telah meluncurkan kerangka regulasi baru untuk mendorong inovasi seperti *Islamic fintech* (State Bank of Pakistan, 2023).

Di Inggris, perkembangan lembaga ekonomi Islam didorong oleh dukungan regulasi pemerintah disertai inovasi produk seperti sukuk dan adaptasi layanan keuangan syariah, meskipun masih dihadapkan pada tantangan literasi masyarakat dan infrastruktur yang terbatas. Menurut laporan *Financial Conduct Authority* (FCA) Inggris pada 2023, dengan pasar keuangan Islam bernilai sekitar GBP 20 miliar atau sekitar USD 25 miliar, dengan sukuk sebagai instrumen utama yang mencapai emisi GBP 4,5 miliar pada 2022 (Financial Conduct Authority, 2023). Dukungan regulasi seperti *Sharia-compliant framework* dari FCA telah memfasilitasi pertumbuhan, namun survei dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 15% masyarakat Inggris yang memahami prinsip keuangan syariah, dibandingkan dengan 30% di negara-negara Muslim (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023a). Infrastruktur terbatas, seperti ketiadaan indeks syariah nasional yang komprehensif, juga menghambat adopsi, meskipun IMF dalam outlook ekonomi UK 2023 mencatat potensi keuangan Islam untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan minoritas Muslim, yang mencapai 5% populasi (International Monetary Fund, 2023).

Permasalahan ini menuntut integrasi kebijakan, edukasi, dan pengembangan produk agar lembaga ekonomi Islam dapat berperan optimal dalam mendorong stabilitas pasar dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Secara global, IFSB merekomendasikan harmonisasi regulasi lintas negara untuk mengatasi tantangan seperti NPL dan literasi, sementara IMF menyarankan investasi dalam edukasi digital untuk meningkatkan adopsi. Dengan dukungan data dari instansi resmi seperti SBP, FCA, IFSB, dan IMF, kelembagaan ekonomi Islam memiliki potensi untuk berkontribusi hingga 5-10% terhadap PDB global jika tantangan ini diatasi melalui kolaborasi internasional.

Penelitian banyak menyoroti aspek regulasi, tata kelola syariah, dan inovasi produk keuangan dalam kelembagaan ekonomi Islam baik di Pakistan maupun Inggris. Naveed et al. (2020) dalam penelitiannya meneliti pengembangan reksa dana syariah di Pakistan yang menunjukkan risiko lebih rendah dibanding dana konvensional dan meningkatnya minat investasi syariah. Majeed dan Zainab (2021) dalam penelitiannya membandingkan performa bank Islam dengan bank konvensional di Pakistan, menyoroti likuiditas dan manajemen risiko yang lebih sehat pada bank Islam namun dengan tantangan profitabilitas. Sairally (2021) dalam penelitiannya mengkaji perkembangan regulasi keuangan Islam di Inggris dan dampaknya terhadap inklusi keuangan masyarakat. Sadat & Gormus (2025) menerapkan metode regresi kuantil pada pasar saham syariah Inggris, mengungkap respons pasar Islam yang berbeda terhadap volatilitas ekonomi global. Khan dan Shah (2023) membandingkan kerangka tata kelola syariah di Pakistan dan negara lain, mengidentifikasi perbedaan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penerapan regulasi.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Pakistan dan Inggris secara komparatif, dengan mengevaluasi tantangan utama yang dihadapi, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang adaptif dan inovatif untuk mendorong stabilitas dan inklusi keuangan syariah. Harapan dari penelitian ini adalah memberikan kerangka strategis yang holistik bagi pengembangan ekosistem ekonomi syariah, khususnya sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai sosial dan lingkungan, seperti yang dibutuhkan dalam pengembangan UMKM di Indonesia dan konteks negara berkembang lainnya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif dan deskriptif yang bertujuan menggali secara mendalam dinamika kelembagaan ekonomi Islam di dua konteks negara, yaitu Pakistan dan Inggris, sekaligus merumuskan refleksi aplikatif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Dalam tahap awal, perumusan masalah dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi karakteristik kelembagaan, tantangan, dan strategi penguatan lembaga ekonomi Islam di kedua negara tersebut. Perumusan ini menjadi landasan bagi seluruh proses penelitian sehingga fokus tetap terarah pada aspek regulasi, tata kelola syariah, inovasi produk keuangan, serta dampak sosial-ekonomi lembaga ekonomi Islam dalam konteks pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, rancangan penelitian memilih studi komparatif kualitatif yang memungkinkan kajian mendalam dengan menguraikan perbedaan dan persamaan secara sistematis dari data empiris dan literatur terkait. Teknik purposive sampling diterapkan dalam pemilihan sumber data sekunder yang relevan dan representatif, seperti penelitian Naveed et al. (2020) terkait reksa dana syariah di Pakistan, Majeed & Zainab (2021) yang membahas perbankan syariah Pakistan, serta Sadat & Gormus (2025) tentang pasar saham syariah di Inggris. Pendekatan ini bertujuan memastikan validitas dan kedalaman analisis dengan pemilihan data yang secara tepat menggambarkan fenomena yang dikaji.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, dengan mengakses artikel jurnal internasional, laporan riset, dan regulasi resmi yang terkait. Instrumen penelitian berupa formulir pencatatan dan matriks analisis disiapkan untuk mengekstraksi informasi kunci terkait karakteristik kelembagaan, mekanisme investasi, tantangan, strategi penguatan, serta indikator kinerja keuangan. Penggunaan beberapa jenis dokumen memungkinkan triangulasi data yang kuat guna meningkatkan kredibilitas dan ketepatan hasil studi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara tematik yang mengelompokkan informasi ke dalam kategori penelitian, antara lain peran regulasi dan tata kelola, karakteristik lembaga, tantangan yang dihadapi, strategi penguatan, dan dampak sosial ekonomi. Tahap analisis difokuskan pada pemaknaan kontekstual setiap data untuk menjawab rumusan permasalahan secara komparatif dan reflektif. Data kuantitatif yang diperoleh dari studi sebelumnya juga dimanfaatkan sebagai pelengkap untuk memperkuat interpretasi kualitatif, misalnya data risiko reksa dana syariah atau performa keuangan bank Islam.

Adapun menguji validitas metode dan hasil analisis, penelitian melakukan *cross-check* dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan studi empiris yang berbeda guna memastikan konsistensi dan keakuratan data. Verifikasi silang terhadap literatur empiris dari kedua negara juga dilakukan untuk menghindari bias dan memperkuat landasan kesimpulan penelitian. Teknik ini menjadi langkah penting untuk menjamin bahwa interpretasi yang dihasilkan memang mencerminkan fenomena riil dan bukan sekadar asumsi semata.

Tahapan akhir penelitian adalah sintesis dari hasil analisis komparatif yang mengintegrasikan temuan utama untuk kemudian diinterpretasikan dalam konteks aplikatif pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya pada pengembangan UMKM di Indonesia. Hasil sintesis ini memberikan perspektif holistik tentang bagaimana penguatan regulasi, pengembangan inovasi produk, dan peningkatan literasi keuangan syariah dapat menyatu dalam model kelembagaan ekonomi Islam yang resilient, inklusif, dan berorientasi keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, tahapan penelitian yang sistematis ini memberikan gambaran lengkap mulai dari perumusan masalah, pengumpulan dan analisis data, pengujian metode, hingga sintesis reflektif yang mendalam. Pendekatan komparatif kualitatif ini tidak hanya menjawab kebutuhan untuk memahami dinamika kelembagaan di dua negara maju dalam konteks keuangan Islam, tetapi juga merumuskan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi penguatan ekonomi syariah di Indonesia dan negara berkembang lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Geografis dan Perekonomian Negara Pakistan dan Inggris

Pakistan adalah sebuah negara republik federal parlementer dengan sistem pemerintahan yang *trias politica* dengan pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala negara adalah Presiden, yang dipilih oleh Majelis Nasional dan Majelis Provinsi untuk masa jabatan 5 tahun, sementara Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dipimpin oleh partai mayoritas di Majelis Nasional. Pakistan memiliki konstitusi yang diadopsi pada 1973, dengan sistem multipartai. Pakistan terbagi menjadi 4 provinsi utama yaitu wilayah Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa serta Balochistan dan wilayah federal seperti Islamabad. Data terkini menunjukkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum 2018 mencapai sekitar 52%, dengan populasi pemilih terdaftar sekitar 106 juta orang (Central Intelligence Agency, 2024).

Pakistan terletak di Asia Selatan, dengan luas wilayah sekitar 881.913 km² atau peringkat ke-33 dunia. Negara ini berbatasan dengan India di timur dengan panjang perbatasan 2.912 km, Afghanistan di barat laut dengan Panjang perbatasan 2.430 km, Iran di barat daya dengan Panjang perbatasan 909 km, dan Cina di utara dengan Panjang perbatasan 523 km, serta memiliki garis pantai sepanjang 1.046 km di Laut Arab. Iklimnya bervariasi seperti gurun di barat, pegunungan Himalaya di utara dengan puncak tertinggi K2, 8.611 m, dan dataran subur di timur. Populasi pada 2023 diperkirakan 231 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk tahunan sekitar 2%, dengan kepadatan penduduk 287 orang/km². Adapun beberapa kota utama di Pakistan yaitu Karachi dengan populasi 16 juta, Lahore dengan populasi 11 juta, dan Islamabad dengan Islamabad 1 juta (Agency Central Intelligence, 2023; World Bank, 2023).

Ekonomi Pakistan didominasi oleh sektor jasa dengan menyumbang sekitar 60% dari PDB, diikuti pertanian dengan menyumbang 20% dan industri 20% dari PDB. PDB nominal pada 2022 mencapai sekitar USD 348 miliar, dengan PDB per kapita USD 1.500 dengan peringkat ke-147 dunia. Pertumbuhan PDB rata-rata 4-6% per tahun dalam dekade terakhir. Sementara itu, inflasi sekitar 12-15% pada tahun 2022-2023, dengan utang luar negeri mencapai USD 130 miliar pada tahun 2023. Sektor yang menjadi fokus Utama pada ekspor yaitu pada tekstil, pakaian, dan pertanian dengan nilai ekspor USD 31 miliar pada 2022, sementara nilai impor tercatat pada angka USD 60 miliar. Pakistan memiliki cadangan devisa sekitar \$20 miliar pada tahun 2023. Adapun tantangan Utama yang dihadapi mencakup defisit perdagangan, ketergantungan pada bantuan IMF, dan dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan pertumbuhan menjadi 0.3% pada 2020 (International Monetary Fund, 2024; World Bank, 2023).

Mayoritas penduduk Pakistan sekitar 60% bekerja di sektor jasa, termasuk perdagangan, keuangan, dan IT, dengan kontribusi terhadap PDB 60%. Sektor pertanian sekitar 20% dari PDB dengan mempekerjakan 38% tenaga kerja, terutama di produksi gandum, kapas, dan buah-buahan

dengan memproduksi gandum 27 juta ton pada 2022. Sektor Industri menyumbang sekitar 20% dari PDB meliputi manufaktur tekstil dan baja, mempekerjakan 23% tenaga kerja. Sementara itu, tingkat pengangguran resmi tercatat sekitar 4-5% pada tahun 2022, namun pengangguran tersembunyi lebih tinggi di pedesaan. Remitansi dari diaspora mencapai USD 31 miliar pada 2022, dengan mendukung 8% dari PDB. Pada bidang pendidikan dan kesehatan masih berkembang, dengan tingkat literasi masyarakat 58% pada tahun 2021 dan angka harapan hidup 67 tahun (Central Intelligence Agency, 2023; World Bank, 2023).

Sementara itu, United Kingdom atau Inggris menganut sistem monarki konstitusional parlementer, di mana Raja atau Ratu bertindak sebagai kepala negara simbolis, sementara Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Parlemen terdiri dari *House of Commons* yang dipilih secara langsung dan *House of Lords* yang dipilih secara ditunjuk. Sistem ini stabil sejak reformasi konstitusi abad ke-19, dengan fokus pada supremasi hukum dan demokrasi. Partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pemilihan umum 2019 mencapai 67,3%, menurut data dari situs resmi Parlemen Inggris yaitu UK Parliament (Parliament.uk, 2019). Inggris terletak di Eropa Barat Laut, terdiri dari pulau utama Great Britain dan Irlandia Utara, dengan luas total 243.610 km². Berbatasan laut dengan Atlantik Utara, Laut Irlandia, dan Selat Inggris. Adapun iklimnya dikategorikan sedang, dengan curah hujan tinggi. Populasi penduduk pada 2023 sekitar 67,9 juta jiwa, menurut data *CIA World Factbook* (Central Intelligence Agency, 2023).

Pada bidang ekonomi, Inggris adalah salah satu terbesar di dunia, dengan PDB nominal sekitar USD 3,1 triliun pada 2023, nilai tersebut menunjukkan kenaikan dari USD 2,6 triliun pada 2014, menurut IMF. Pertumbuhan PDB riil rata-rata 1,5% per tahun dari 2014-2023, dengan inflasi sekitar 9,1% pada 2022 akibat pandemi dan krisis energi. Adapun sektor yang menjadi fokus utama dalam ekspor meliputi mesin, bahan kimia, dan jasa keuangan, dengan defisit perdagangan sekitar 5% PDB pada 2023. Mata pencaharian utama Inggris bergantung pada sektor jasa dengan menyumbang 80% dari PDB pada tahun 2023, termasuk keuangan, teknologi, dan pariwisata, diikuti manufaktur dengan 10%, seperti otomotif dan farmasi, serta pertanian dengan 1%. Tingkat pengangguran turun dari 7,8% pada 2014 menjadi 4,2% pada 2023, menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Pendapatan per kapita sekitar \$46.000 pada 2023 (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023).

3.2 Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Pakistan dan Inggris

Dinamika lembaga ekonomi Islam di Pakistan tercerminkan oleh perkembangan keuangan Islam yang semakin matang dan memiliki kontribusi signifikan terhadap stabilitas pasar keuangan. Peran regulasi dan penguatan tata kelola syariah menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan kepercayaan investor terhadap produk-produk keuangan Islam. Lembaga ekonomi Islam di Pakistan mencakup beberapa kelembagaan keuangan syariah yang ada, salah satu sektor yang menjadi fokus dalam dinamika ialah pada aspek pengembangan dan karakteristik reksa dana syariah sebagai instrumen kelembagaan ekonomi Islam. Reksa dana syariah di Pakistan bergerak dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat, seperti larangan investasi pada sektor yang dianggap haram seperti alkohol, tembakau, serta praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Mekanisme investasi reksa dana syariah mengikuti prinsip wakalah dan mudharabah yang memberikan dasar kontraktual antara investor, manajer investasi, dan perusahaan investasi (Naveed et al., 2020).

Naveed et al. (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa reksa dana syariah di Pakistan cenderung memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan reksa dana konvensional. Hal ini disebabkan oleh proses penyaringan investasi yang ketat berdasarkan hukum syariah yang menghindari sektor-sektor berisiko tinggi dan spekulatif. Selain itu, reksa dana syariah menunjukkan kestabilan yang lebih tinggi serta kemampuan seleksi investasi yang lebih baik, sehingga menarik minat investor yang mengutamakan prinsip halal dan pengelolaan risiko yang hati-hati.

Dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Pakistan pada sektor perbankan turut menjadi fokus karena memiliki peran sebagai penyalur pembiayaan pada masyarakat serta pihak terkait. Majeed & Zainab (2021) dalam penelitiannya membandingkan kinerja keuangan bank-bank Islam dengan bank konvensional di Pakistan selama periode 2008-2019. Dari sisi kelembagaan, bank-bank Islam di Pakistan menunjukkan dinamika yang cukup kuat dalam hal kapitalisasi, likuiditas, dan manajemen risiko. Bank Islam cenderung memiliki permodalan yang lebih baik, risiko yang lebih rendah, serta likuiditas yang lebih tinggi dibanding bank konvensional. Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan keuangan yang ketat serta peran aktif dari Dewan Pengawas Syariah yang difasilitasi oleh Bank Sentral Pakistan, yang turut mengatur dan mengawasi praktik-praktik syariah dalam operasional bank.

Namun demikian, bank-bank Islam di Pakistan menghadapi beberapa tantangan kelembagaan yang mempengaruhi profitabilitasnya. Meskipun lebih sehat dari sisi risiko dan likuiditas, laba bank Islam cenderung lebih rendah dibandingkan bank konvensional akibat beberapa faktor, termasuk tingginya proporsi *non-performing loans* dan keterbatasan instrumen keuangan Islam yang menyebabkan surplus dana sulit disalurkan secara optimal. Kendala teknis dan etis dalam penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah seperti musyarakah dan mudharabah juga turut mempengaruhi kinerja. Disamping itu, dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Pakistan menunjukkan adanya kemajuan dalam hal aturan, pengawasan, dan stabilitas bank Islam (Majeed & Zainab, 2021).

Dinamika lembaga ekonomi syariah di Inggris menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sebagai respons terhadap kebutuhan dan potensi komunitas Muslim yang besar di negara tersebut. Disamping itu, perkembangan lembaga ekonomi syariah di Inggris juga mendapat dukungan regulasi dari pemerintah, serta keberhasilan produk-produk keuangan Islam yang semakin diterima oleh pasar dan ekonomi Inggris. Inggris menjadi salah satu pusat keuangan Islam di Eropa dengan keberadaan beberapa bank yang sepenuhnya berbasis syariah serta bank-bank konvensional yang menawarkan produk syariah (Sairally, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan ekonomi syariah di Inggris mendapat perhatian khusus serta ketertarikan publik.

Keuangan Islam di Inggris mendapatkan dukungan regulasi yang memungkinkan produk keuangan Islam dikembangkan secara setara dengan keuangan konvensional, meskipun belum ada undang-undang khusus yang mengatur secara terpisah keuangan Islam. Sejak awal 2000-an, pemerintah Inggris mulai membentuk kerangka pajak dan regulasi yang mendukung pertumbuhan keuangan Islam. Inggris juga menjadi negara Barat pertama yang meluncurkan sukuk atau obligasi Syariah secara resmi, dengan London sebagai pusat penerbitan dan perdagangan sukuk internasional yang menarik pemesanan investasi besar dari seluruh dunia. Pemerintah Inggris menekankan pentingnya menyediakan keuangan Islam yang aksesibel bagi semua warga negara dan memastikan perlakuan yang adil antara keuangan Islam dan konvensional, termasuk dalam hal pajak dan regulasi (Sairally, 2021).

Dinamika lembaga ekonomi syariah di Inggris juga memfokuskan dalam sektor pasar saham yang beroperasi dalam konteks pasar yang unik dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya berbeda dari lembaga konvensional dengan mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Penelitian mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor keuangan lokal mempengaruhi pasar saham syariah dan pasar saham konvensional di Inggris, terutama menggunakan metode *Momentary Multiple Quantile Regression* (MM-QR) yang mampu mendeteksi efek asimetris pada fase pasar *bullish* (kuantil atas), *bearish* (kuantil bawah) dan normal (kuantil tengah). Faktor lokal meliputi *Credit Default Swaps* (CDS), nilai tukar, dan hasil obligasi 10 tahun (Sadat & Gormus, 2025).

Dalam penelitian menunjukkan perbedaan untuk pasar Inggris, dinamika pasar saham syariah lebih tahan terhadap volatilitas terkait risiko kredit atau *Credit Default Swaps* (CDS) dan memiliki hubungan berbeda dengan indeks volatilitas dibanding pasar konvensional. Hal ini menggambarkan

karakter lembaga ekonomi syariah yang lebih fokus pada prinsip bagi hasil dan transaksi berbasis aset, sehingga berbeda responnya terhadap guncangan pasar dibanding lembaga ekonomi konvensional. Urgensi pada pemahaman bahwa pasar saham syariah tidak hanya sekadar alternatif investasi, tetapi juga memiliki dinamika dan sensitivitas yang berbeda terhadap kondisi keuangan makroekonomi dan global. Oleh karena itu, hal tersebut dasar pengembangan lembaga keuangan syariah yang lebih efektif di Inggris, serta membantu investor dalam diversifikasi portofolio yang menggabungkan instrumen syariah dengan yang konvensional (Sadat & Gormus, 2025).

Berdasarkan pembahasan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kelembagaan ekonomi Islam di Pakistan dan Inggris menunjukkan dinamika yang kompleks dan signifikan dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan keuangan syariah. Kedua negara memperlihatkan pentingnya integrasi antara penguatan regulasi, tata kelola syariah yang kuat, dan inovasi produk keuangan dalam membangun kelembagaan ekonomi Islam yang resilient dan berkelanjutan. Model Pakistan menyoroti peran pengawasan dan kapasitas kelembagaan dalam stabilisasi keuangan, sedangkan model Inggris menekankan adaptasi pasar dan inklusivitas regulasi sebagai kunci keberhasilan. Pendekatan gabungan ini menjadi referensi penting bagi pengembangan ekonomi Islam di negara lain yang ingin mengoptimalkan peran keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

3.3 Tantangan dan Strategi Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam dalam Menghadapi Tantangan Global di Negara Pakistan dan Inggris

Kelembagaan ekonomi Islam di mengalami dinamika yang kompleks dalam perjalanan perkembangannya di Pakistan. Namun, terdapat tantangan kelembagaan ekonomi Islam di Pakistan dalam menghadapi tantangan global. Tantangan Kelembagaan Ekonomi Islam di Pakistan mencakup beberapa aspek diantaranya rendahnya profitabilitas bank Islam, meskipun bank-bank Islam di Pakistan menunjukkan likuiditas yang lebih baik, permodalan yang kuat, dan risiko yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional, mereka menghadapi tantangan profitabilitas yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar pembiayaan yang diberikan berupa pinjaman bermasalah (*non-performing loans*) serta kualitas aset yang lebih rendah (Majeed & Zainab, 2021).

Keterbatasan Instrumen Keuangan Islam juga menjadi tantangan dalam kelembagaan ekonomi Islam di Pakistan, dimana bank Islam menghadapi kesulitan dalam mengelola likuiditas karena terbatasnya instrumen keuangan syariah yang tersedia di pasar. Ini menyebabkan kesulitan dalam mengelola kelebihan dana secara optimal. Disamping itu, tata kelola dan pengawasan Syariah menjadi turut menjadi tantangan, hal tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan akan peningkatan tata kelola syariah yang efektif dan pengawasan ketat agar produk dan praktik keuangan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan bukan sekadar labelisasi (Majeed & Zainab, 2021).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, kelembagaan ekonomi Islam diperlukan strategi untuk menyiasati tantangan Global. Strategi kelembagaan ekonomi Islam memiliki beberapa cakupan, diantaranya peningkatan regulasi dan standarisasi, meningkatnya regulasi lewat seperangkat konsep yang mengatur kelembagaan disertai dengan standarisasi yang ketat lewat kepengawasan diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi. Pengembangan produk dan instrumen keuangan syariah dilakukan dengan menyusun inovasi produk dan perluasan instrumen keuangan syariah. Disamping itu, perlu adanya peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat, hal tersebut menjadi aspek krusial karena belum semua lapisan masyarakat teredukasi terkait kelembagaan ekonomi Islam. Kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, akademisi, dan masyarakat penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan mendorong adopsi produk syariah secara lebih luas (Majeed & Zainab, 2021).

Kelembagaan ekonomi Islam di Inggris menjadi sesuatu yang menarik serta menjadi perhatian publik karena perbedaan prinsip yang mendasari dalam operasionalnya, namun hal tersebut masih terdapat tantangan dalam kelembagaan ekonomi Islam yang mengalami transformasi dan adaptasi terhadap lanskap global yang berubah, terutama dalam konteks pengembangan yang berkelanjutan. Sairally (2021) dalam penelitiannya mengemukakan tantangan utama yang dihadapi dalam kelembagaan ekonomi Islam di Inggris memiliki beberapa cakupan diantaranya ; keterbatasan literasi dan pemahaman masyarakat tentang prinsip ekonomi Islam yang berbeda mendasar dari sistem konvensional, yang berdampak pada adopsi produk dan layanan ekonomi Islam.

Tantangan regulasi dan infrastruktur yang perlu diperkuat agar lembaga ekonomi Islam bisa beroperasi lebih luas dan efektif, khususnya dalam kaitannya dengan akses layanan keuangan syariah di berbagai lapisan masyarakat. Disamping itu, persaingan dengan sistem ekonomi dan keuangan konvensional global yang sudah mapan, yang menuntut lembaga ekonomi Islam untuk berinovasi dalam layanan dan produk supaya tetap relevan di pasar internasional. Penguatan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yang semakin menjadi tuntutan global agar ekonomi Islam tidak hanya sekadar berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan. Tuntutan tersebut turut menjadi tantangan kelembagaan ekonomi Islam di Inggris yang masih berkembang dengan cakupan yang belum seluas serta penawaran produk dan layanan yang belum kompleks seperti kelembagaan ekonomi konvensional (Sairally, 2021) .

Dalam menghadapi tantangan kelembagaan ekonomi Islam di Inggris, diperlukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan global. Strategi kelembagaan ekonomi Islam untuk menjawab persoalan tersebut memiliki beberapa cakupan diantaranya; integrasi prinsip ekonomi Islam dengan agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sehingga lembaga Islam tidak hanya fokus pada aspek keuangan tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. Implementasi strategi tersebut tercermin dalam kolaborasi institusi dan publikasi yang mengedepankan riset inovatif dan solusi praktis untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penguatan literasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah agar lebih banyak lapisan masyarakat dapat memahami dan mengakses produk keuangan Islam dengan nyaman dan percaya. Pengembangan regulasi yang adaptif dan mendukung pertumbuhan lembaga keuangan Islam, termasuk kolaborasi antara berbagai institusi keuangan Islam dan lembaga regulasi untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan layanan (Sairally, 2021).

Memperluas inovasi produk dan layanan, termasuk keuangan inklusif yang menjangkau segmen masyarakat yang selama ini sulit dijangkau oleh perbankan konvensional, melalui pemanfaatan teknologi dan pendekatan baru dalam pembiayaan syariah. Perluasan inovasi produk dan layanan ini menjadi langkah penting, pasalnya keuangan inklusif bagi masyarakat yang belum terjangkau akses Lembaga keuangan konvensional akan menjadi solusi dan menambah nilai kepercayaan lembaga keuangan Islam. Disamping itu gerakan dalam mendorong komunitas akademis, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk bersama-sama membangun ekosistem yang mengedepankan prinsip keadilan, bagi hasil, dan keberlanjutan sebagai dasar keberlangsungan ekonomi Islam di Inggris. Sinergitas tersebut dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan global dengan mengedepankan kepentingan bersama dalam mewujudkan ekosistem keuangan Islam yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kelembagaan ekonomi Islam di Pakistan dan Inggris menghadapi tantangan kompleks dalam konteks global yang dinamis. Di Pakistan, meskipun bank Islam menunjukkan likuiditas dan permodalan yang lebih baik dibandingkan bank konvensional, profitabilitas rendah akibat tingginya non-performing loans dan keterbatasan instrumen keuangan syariah menjadi hambatan utama. Tantangan tata kelola syariah yang efektif juga perlu diatasi melalui penguatan regulasi, standar pengawasan, dan inovasi produk keuangan syariah, didukung oleh upaya peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Sementara itu, kelembagaan ekonomi Islam di Inggris menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi masyarakat mengenai ekonomi Islam, regulasi dan infrastruktur yang belum memadai, serta persaingan ketat dengan sistem keuangan konvensional global. Strategi yang diambil menitikberatkan pada integrasi prinsip ekonomi Islam dengan pembangunan berkelanjutan, pengembangan regulasi adaptif, penguatan literasi, dan inovasi produk layanan yang inklusif. Sinergi antara institusi, akademisi, dan pembuat kebijakan menjadi kunci untuk membangun ekosistem keuangan Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3.4 Reflektif Perbandingan Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Pakistan dan Inggris bagi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Indonesia

Perbandingan kelembagaan ekonomi Islam di Pakistan mengintegrasikan temuan empiris dengan konteks transformasi UMKM Indonesia, memberikan kerangka reflektif untuk pengembangan kelembagaan ekonomi Islam yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara sinergis. Naveed et al. (2020) dalam penelitiannya, meneliti risiko pada reksa dana Islam dibandingkan dengan reksa dana konvensional di Pakistan menggunakan model-model risiko yang komprehensif seperti CAPM, *Fama French*, serta analisis downside risk. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa reksa dana Islam mengalami risiko yang lebih rendah baik itu risiko sistematis, idiosinkratik, maupun downside risk jika dibandingkan reksa dana konvensional, hal tersebut menjadikannya pilihan menarik terutama bagi investor yang mengutamakan kepatuhan syariah sekaligus preferensi risiko rendah. Hal ini mencerminkan kekuatan kelembagaan ekonomi Islam di Pakistan dalam menyediakan instrumen keuangan yang stabil dan etis untuk pasar modalnya.

Majeed & Zainab (2021) dalam penelitiannya mengkaji performa keuangan perbankan Islam dibandingkan dengan perbankan konvensional, menunjukkan bahwa bank-bank Islam memiliki kinerja yang kompetitif, dengan keunggulan dalam beberapa aspek seperti stabilitas dan kepatuhan pada prinsip syariah. Kelembagaan ekonomi Islam di Pakistan melalui perbankan menunjukkan kapasitas yang baik untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menekankan tata kelola yang etis dan mitigasi risiko yang efektif. Perkembangan positif tersebut akan menjadi daya tarik bagi publik serta masyarakat tentang keuangan Islam yang berdampak pada peningkatan kepercayaan dalam menginvestasikan dananya yang akan memberikan dampak positif bagi likuiditas bank Islam.

Panjaitan et al. (2025) dalam penelitian mereka mengenai orientasi pembelajaran UMKM Indonesia terhadap tuntutan intelektual, kewirausahaan sosial, dan tata kelola lingkungan dalam mendukung transformasi digital dan keberlanjutan menunjukkan pentingnya integrasi aspek sosial, edukasi, dan teknologi dalam penguatan ekonomi berkelanjutan. Keterkaitan reflektif dengan kelembagaan ekonomi Islam di Pakistan, terlihat bahwa instrumen keuangan syariah dan kelembagaan yang stabil serta beretika dapat menjadi pendorong dalam pembentukan ekosistem UMKM yang berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan pembelajaran, kewirausahaan sosial, dan tata kelola lingkungan yang dikembangkan di Indonesia dapat mengadopsi dan mengadaptasi mekanisme risiko rendah dan kepatuhan syariah yang telah terbukti di ekosistem ekonomi Islam Pakistan untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi lokal.

Kelembagaan ekonomi Islam di Inggris memperlihatkan karakteristik unik yang adaptif terhadap dinamika pasar finansial global dan regional. Sadat & Gormus (2025) dalam penelitiannya dengan metode *Moment Quantile Regression* (MM-QR) menunjukkan bahwa pasar saham Islam di Inggris dipengaruhi secara berbeda oleh faktor-faktor finansial dibanding pasar saham konvensional. Nilai tukar yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengembalian saham Islam mengindikasikan sensitivitas kelembagaan ekonomi Islam terhadap fluktuasi ekonomi global secara lebih responsif dan kontekstual. Sebaliknya, pengaruh negatif *Credit Default Swaps* (CDS) pada pasar konvensional saat kondisi bearish dan normal menegaskan perbedaan struktur risiko dan mekanisme mitigasi di pasar Islam.

Hal ini mencerminkan struktur kelembagaan ekonomi Islam di Inggris yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan syariah, tetapi juga mampu menjawab tantangan volatilitas pasar melalui mekanisme yang lebih adaptif. Keberadaan bank-bank syariah lengkap maupun yang menawarkan produk syariah, serta dukungan regulasi yang inklusif sejak awal 2000-an, memperkuat posisi Inggris sebagai pusat keuangan Islam di Eropa. London sebagai pusat penerbitan dan perdagangan sukuk internasional menggambarkan tingkat kematangan institusional dan kepercayaan pasar terhadap produk keuangan berprinsip syariah (Sairally, 2021).

Integrasi pembelajaran bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, menekankan pentingnya pengembangan strategi penguatan kelembagaan ekonomi syariah yang mampu mengakomodasi nilai-nilai sosial dan lingkungan, terutama di sektor UMKM. Kelembagaan ekonomi Islam di Inggris dapat memberikan refleksi penting dalam konteks ini, terutama dalam hal diantaranya; adaptasi regulasi dan dukungan pemerintah, hal tersebut diimplementasikan oleh pemerintah Inggris yang telah membangun kerangka regulasi yang tidak diskriminatif antara keuangan Islam dan konvensional, memastikan akses yang adil dan pengembangan produk inovatif seperti sukuk. Indonesia dapat menguatkan regulasi serupa untuk mendukung inklusi keuangan syariah secara lebih luas dan mendalam (Panjaitan et al., 2025).

Keberhasilan Inggris dalam meluncurkan produk sukuk dan mengembangkan pasar yang matang menuntut Indonesia untuk memperluas inovasi produk keuangan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan, terutama untuk mendukung UMKM yang menerapkan orientasi sosial dan lingkungan. Kelembagaan di Inggris menunjukkan mekanisme pengelolaan risiko yang lebih adaptif terhadap volatilitas global. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam memperkuat kapasitas kelembagaan agar lebih resilien di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pendekatan sosial entrepreneurship dan tata kelola lingkungan dalam pengembangan UMKM di Indonesia sejalan dengan kebutuhan kelembagaan yang responsif dan berkelanjutan sebagaimana praktik di Inggris, sehingga transformasi digital dan inovasi sosial-ekonomi dapat lebih optimal (Panjaitan et al., 2025).

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa reflektif perbandingan kelembagaan ekonomi Islam dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia menegaskan bahwa integrasi kekuatan instrumen keuangan syariah dan kelembagaan yang stabil dari Pakistan, serta adaptasi strategi regulasi dan inovasi produk keuangan dari Inggris, dapat menjadi pondasi penting untuk memperkuat ekosistem UMKM berkelanjutan di Indonesia. Sinergi antara aspek sosial, edukasi, kewirausahaan sosial, dan tata kelola lingkungan di UMKM Indonesia dengan prinsip dan praktik kelembagaan Islam yang matang dari dua negara tersebut memberikan kerangka strategis yang holistik dan responsif dalam membangun ekonomi syariah yang tidak hanya berkelanjutan secara finansial, tetapi juga berorientasi kepada pembangunan sosial dan lingkungan secara berimbang. Pendekatan ini memperkuat kapasitas adaptasi dan resiliensi institusi agar mampu mendukung transformasi digital dan inovasi sosial-ekonomi UMKM dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang kompleks.

4. KESIMPULAN

Perbandingan dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Pakistan dan Inggris menunjukkan bahwa kedua negara memperlihatkan pendekatan strategis yang beragam namun saling melengkapi dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan keuangan syariah. Di Pakistan, penguatan regulasi dan tata kelola syariah yang ketat meningkatkan kepercayaan terhadap produk keuangan Islam, walaupun tantangan seperti rendahnya profitabilitas akibat tingginya non-performing loans dan keterbatasan instrumen keuangan syariah masih harus diatasi. Oleh karena itu strategi yang dicanangkan melalui inovasi dalam pengembangan produk seperti reksa dana syariah yang mengedepankan risiko rendah dan kepatuhan syariah menjadi salah satu kekuatan lembaga keuangan Islam di negeri tersebut.

Di Inggris sendiri keberhasilan adaptasi regulasi yang inklusif serta dukungan dari pemerintah menjadi faktor kunci dalam mendorong perkembangan keuangan Islam yang lebih inklusif dan inovatif, seperti peluncuran sukuk internasional. Tantangan utama di Inggris lebih terkait dengan keterbatasan literasi masyarakat dan infrastruktur yang perlu diperkuat. Oleh karena itu strategi yang dirumuskan yaitu pengembangan produk keuangan yang adaptif terhadap dinamika pasar global dan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang akan menempatkan Inggris sebagai pusat keuangan syariah yang matang dan resilien.

Refleksi perbandingan dinamika kelembagaan ekonomi Islam pada kedua negara tersebut bagi Indonesia dalam memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Integrasi kekuatan regulasi dan tata kelola oleh Pakistan dengan inovasi produk dan pendekatan regulasi adaptif oleh Inggris dapat membantu membangun ekonomi syariah yang holistik, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu penekanan terhadap peningkatan literasi keuangan syariah serta kolaborasi strategis antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat mengembangkan kelembagaan ekonomi syariah yang lebih stabil, inovatif, dan responsif terhadap tantangan ekonomi global, mendukung pertumbuhan UMKM yang berbasis nilai keadilan, keberlanjutan sosial, dan pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agency Central Intelligence. (2023). *CIA World Factbook: Pakistan - Geography*.
<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/pakistan/>
- Central Intelligence Agency. (2023). United Kingdom. In *The World Factbook*.
- Central Intelligence Agency. (2023). *CIA World Factbook: Pakistan - People and Society*.
<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/pakistan/>
- Central Intelligence Agency. (2024). *CIA World Factbook: Pakistan - Government*.
<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/pakistan/>
- Financial Conduct Authority. (2023). *Wholesale Financial Markets Review 2023*.
<https://www.fca.org.uk>
- International Monetary Fund. (2023). *United Kingdom Economic Outlook 2023*.
<https://www.imf.org/en/Countries/GBR>
- International Monetary Fund. (2024). *Pakistan Country Report*.
<https://www.imf.org/en/Countries/PAK>
- Islamic Financial Services Board. (2023). *Global Islamic Finance Report 2023*. <https://www.ifsb.org>
- Majeed, M. T., & Zainab, A. (2021). A comparative analysis of financial performance of Islamic banks vis-à-vis conventional banks: evidence from Pakistan. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 331–346. <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2018-0093>
- Naveed, F., Khawaja, I., & Maroof, L. (2020). Are Islamic mutual funds exposed to lower risk compared to their conventional counterparts?: Empirical evidence from Pakistan. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 69–87. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2019-0012>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Financial Literacy Survey 2023*.
<https://www.oecd.org>

- Panjaitan, J. M. P., Sumiyana, S., Wivaquassaniyyah, W., & Nugroho, A. H. L. (2025). Indonesian SMEs' learning orientation to acquire intellectual demands, social entrepreneurship and environmental governance for enhancing digital transformation and sustainability. *International Journal of Social Economics*, 1–16. <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2023-0196>
- Sadat, I., & Gormus, S. (2025). Divergent impacts of financial factors on Islamic vs conventional stock markets: insights from advanced countries using MM-QR. *Journal of Capital Markets Studies*, 9(1), 6–27. <https://doi.org/10.1108/JCMS-06-2024-0030>
- Sairally, B. S. (2021). Editorial: Embracing New Horizons. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 282–283. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2021-256>
- State Bank of Pakistan. (2023). *Islamic Banking Bulletin 2023*. <https://www.sbp.org.pk>
- World Bank. (2023). *Pakistan Economic Data (2013–2023)*. <https://data.worldbank.org/country/pakistan>